

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dinamika pelaksanaan e-Musrenbang sebagai wujud *e-participation* di Kelurahan Tanjung Priok, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tindak lanjut e-Musrenbang. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif terhadap dokumen dan wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat pada implementasi e-Musrenbang. Kerangka analisis yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi, pengelompokan *power* dan *interest* oleh Rachel Thompson, serta konsep *e-participation* untuk melihat partisipasi digital yang dilakukan.

Dinamika implementasi e-Musrenbang di Kelurahan Tanjung Priok melalui indikator lingkungan implementasi dari Grindle menunjukkan adanya ketimpangan pengaruh dalam merealisasikan usulan, terutama pada peran DPRD yang memiliki *power* tinggi dalam mendorong realisasi usulan, namun terhenti pada komunikasi dengan sebagian UKPD terkait dan ditemukan persepsi sebagian informan mengenai adanya pengaruh relasi politik tertentu dalam proses prioritas usulan. DPRD memiliki *interest* rendah sebab tidak memiliki wewenang dalam menindak tegas UKPD, melainkan Subanppeda Jakarta Utara yang memiliki wewenang tersebut. Selanjutnya, melalui indikator isi kebijakan terlihat peran kerjasama antara Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Subanppeda Jakarta Utara, UKPD, DPRD, dan RW dalam integrasi antar lembaga dan terlihat meningkatnya sebagian kepedulian masyarakat Kelurahan Tanjung Priok terhadap wilayah RW masing-masing untuk tetap mengusulkan di e-Musrenbang.

Kemudian, terkait faktor pendukung tindak lanjut usulan melalui konsep *e-participation* menunjukkan bahwa pertama, bentuk tanggung jawab UKPD melalui usulan yang diajukan RW dengan hasil yang sudah diakomodir menunjukkan responsivitas dari Kelurahan dan Kecamatan. Kedua, melalui *power* dan *interest* yang membentuk karakteristik institusi dan rezim berbasis partisipasi digital dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Ketiga, e-

Musrenbang sudah pada kategori *e-information* dan *e-consultation* yang dibuktikan dengan sosialisasi, pelatihan, dan adanya diskusi melalui lobi dan negosiasi untuk usulan dapat terealisasi di semua RW di Kelurahan Tanjung Priok oleh Subanppeda Jakarta Utara melalui forum Kelurahan.

Lalu, faktor penghambat tindak lanjut usulan usulan e-Musrenbang dari sisi pemerintah diantaranya pertama, terdapat gap pemahaman sebagian masyarakat mengenai realisasi usulan Musrenbang sebab keinginan untuk semua usulan prioritas direalisasikan dengan pelaksana teknis yang terhalang spesifikasi teknis. Kedua, terkait indikator kepatuhan dan responsivitas melalui ketidaksiapan sebagian oknum masyarakat Kelurahan Tanjung Priok yang menolak ditindak lanjuti usulannya oleh UKPD, menyebabkan adanya sebagian celah antara kepatuhan terhadap kebijakan dengan responsivitas masyarakat. Ketiga, anggaran DKI Jakarta yang harus disesuaikan dengan lima wilayah lainnya dan disesuaikan dengan wilayah RW yang membutuhkan. Sedangkan, dari sisi masyarakat yaitu belum ada *power* untuk memastikan bahwa usulan dapat direalisasikan dan rendahnya partisipasi anggota DPRD dalam mengadakan agenda reses di sebagian wilayah RW Kelurahan Tanjung Priok. Dengan demikian, implementasi e-Musrenbang di Kelurahan Tanjung Priok menunjukkan adanya upaya dalam memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan melalui partisipasi digital, dengan menyediakan prosedur yang terstruktur dimulai dari input usulan RW sampai pada proses verifikasi usulan dan upaya dalam mewujudkan partisipasi digital melalui e-Musrenbang sudah menunjukkan arah yang optimal dan jelas melalui hubungan antar aktor, pengelompokan *power* dan *interest* serta menunjukkan pada tindak lanjut lanjut sebagian usulan yang masuk pada sistem e-Musrenbang masih menghadapi beberapa hambatan yang substansial dan berimplikasi langsung pada partisipasi masyarakat di e-Musrenbang.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Penelitian ini menegaskan pentingnya realisasi usulan masyarakat melalui partisipatif digital pada e-Musrenbang yang menunjukkan bahwa permasalahan partisipasi dan realisasi usulan masyarakat tidak hanya disebabkan dari kendala administratif pada tingkatan RW, namun menjadi permasalahan sistemik dari relasi

Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dan Subanppeda Jakarta Utara. Hal ini diperkuat dari argumen pada teori implementasi kebijakan Grindle (2017) bahwa keberhasilan kebijakan dapat dipengaruhi oleh indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi, serta konsep *e-participation*. Secara teoritis, temuan pada penelitian ini mengindikasikan perlunya pengembangan mengenai *policy feedback* dan *policy evaluation* pada sistem e-government. Evaluasi pada usulan e-Musrenbang cenderung berhenti pada indikator jumlah usulan yang terealisasi dengan serapan anggaran yang terpakai, namun belum dapat mengukur sejauh mana usulan yang terealisasi dapat menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator dari kualitas e-Musrenbang yang berbasis *output* dan *outcome*, melalui persepsi dan testimoni dari masyarakat sebagai pengguna dan penerima manfaat dari e-Musrenbang.

Pada penelitian selanjutnya dapat membuka ruang pada teori *collaborative governance* dan model *pentahelix* pada partisipasi digital. Integrasi antara pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan media menjadi penting, khususnya pada cakupan wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memiliki karakteristik rentan pada persoalan infrastruktur yang berulang. Secara teoritis e-Musrenbang dapat dipahami sebagai sistem informasi, namun juga menjadi bagian dari kolaborasi yang memerlukan transparansi anggaran, integrasi anggaran, dan pemanfaatan dari teknologi, seperti geo-tagging dan analisis sentimen untuk dapat merealisasikan usulan agar tepat sasaran.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan dalam mendukung implementasi e-Musrenbang agar dapat memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Subanppeda Jakarta Utara perlu mengembangkan fitur dashboard feedback usulan pada sistem e-Musrenbang yang memuat informasi secara rinci mengenai status usulan, alasan usulan belum dapat direalisasikan, termasuk pada kendala anggaran maupun teknis di lapangan. Langkah ini penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai proses realisasi usulan.

Kedua, diperlukan integrasi monitoring tindak lanjut usulan antar UKPD yang terhubung dengan sistem e-Musrenbang, melalui seluruh aktor yang terlibat, mulai dari Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Subanppeda Jakarta Utara, dan UKPD untuk dapat memantau perkembangan usulan secara berkala. Integrasi tersebut juga dapat membantu dalam mengidentifikasi terutama pada usulan yang berulang setiap tahunnya agar mendapat perhatian dan prioritas yang lebih jelas pada proses perencanaan dan penganggaran.

Ketiga, perlu untuk dilakukan penguatan literasi digital bagi setiap RW melalui sosialisasi dan pelatihan secara berkala mengenai mekanisme e-Musrenbang, penyusunan data usulan dengan basis kebutuhan wilayah masing-masing RW dan pemahaman kriteria usulan untuk dapat diakomodasi. Dengan adanya upaya ini, Kelurahan Tanjung Priok dapat meningkatkan kualitas usulan yang diajukan oleh seluruh RW, meminimalkan pengulangan usulan yang sama setiap tahunnya, dan memperkuat peran RW sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RW masing-masing.